

PANDANGAN MORAL EMILE DURKHEIM

DITELAAH DARI SUDUT FILSAFAT PANCASILA

Djurneta Adi Imam Muhtu

Tenaga Pengajar dalam mata kuliah Filsafat Kebudayaan Fakultas Filsafat UGM

Penelitian karya-karya Durkheim menunjukkan bahwa antara ajaran moralnya dan Pancasila ada perbedaan yang sangat penting bahkan dapat dikatakan perbedaan tingkat. Memang harus diakui bahwa ajaran Durkheim dapat menyumbang pada kehidupan masyarakat, namun demikian bagi manusia Indonesia yang bersifat hidup Pancasila, ajarannya harus dipahami secara kritis.

Kehidupan bersama dalam abad dua puluh ini dihadapkan pada tantangan-tantangan berat. Kenyataan adanya kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, di satu pihak menunjang pembangunan yang bertujuan memperbaiki taraf hidup manusia, di lain pihak menguji manusia apakah ia mampu menjalani hidup dengan wajar, tidak berlebih-lebihan. Memang ilmu pengetahuan dan teknik dapat menjunjung martabat manusia hingga dapat menjadi tuan besar. Namun tidak boleh dilupakan bahwa teknik dapat juga membuat manusia menjadi budak. Pada taraf masyarakat teknologik yang sangat tinggi, lingkungan hidup dan ruang telah diubah oleh teknik. Teknik telah menyusup ke dalam hati sanubari manusia yang paling dalam.

Mesin-mesin cenderung untuk menciptakan tidak hanya lingkungan hidup baru, melainkan juga mengubah hakikat manusia. Lingkungan hidup bukan lagi milik manusia, tetapi justru telah menjadi pemilik manusia. Manusia diharuskan menyesuaikan diri pada suatu dunia yang sebenarnya tidak diciptakan baginya.

Usaha untuk mencapai suatu kehidupan modern, sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, dapat dilaksanakan dalam berbagai cara. Setiap bangsa dapat memilih jalan mana yang ia tempuh serta suasana terakhir yang bagaimana yang ia tuju, terutama dalam kaitannya dengan peranan nilai-nilai moral dan transendental dengan nilai sekuler. Cara ini tergantung pada nilai-nilai dari

bangsa itu sendiri serta nilai kualitatif kehidupannya.

Bangsa Indonesia telah menentukan filsafat hidupnya, yaitu Pancasila. Bagaimana ajaran Emile Durkheim ditelaah dari sudut Pancasila?

Notonagoro (1976) menunjukkan dalam definisinya tentang manusia, bahwa manusia merupakan makhluk monopluralistik. Ditekankan adanya sifat dasar taqwa dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Drijarkara (1971) menunjukkan dengan jelas keterbatasan manusia. Dengan sifat keterbatasan inilah ditekankan bahwa manusia bukan sumber terjadinya, sumber terjadinya adalah Tuhan Yang Maha Esa.

Koento Wibisono (1983) melihat pembangunan sebagai pembangunan yang menyeluruh dan harus menunjukkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan spiritual. Penelitian karya-karya Durkheim menunjukkan bahwa antara ajaran moralnya dan Pancasila ada perbedaan yang sangat penting bahkan dapat dikatakan perbedaan tingkat. Memang harus diakui bahwa ajaran Durkheim dapat menyumbang pada kehidupan masyarakat, namun demikian bagi manusia Indonesia yang bersifat hidup Pancasila, ajarannya harus dipahami secara kritis. Sebab ada ajaran Durkheim yang tidak bisa diterima oleh bangsa Indonesia, yakni ketidakpercayaannya terhadap Tuhan.

David Emile Durkheim yang lahir tanggal 15 April 1858 dan meninggal pada tahun 1917 merupakan filsuf moral yang sangat tangguh. Dasar kecerdasan otak yang gemilang dilanjutkan dalam pendidikan tinggi membentuk dirinya menjadi filsuf yang ulung. Menurut Lukes:

"..... The hot house atmosphere of the ,cole did everything to encourage a view of politics from a high plane of principle". (Lukes, 1973)

Suasana akademik yang bertingkat sangat tinggi yang meliputi ,cole itu, dengan mahasiswa-mahasiswa pilihan, membangkitkan jiwa Durkheim secara penuh, untuk aktif berdiskusi, mengajukan argumentasi-argumentasi yang bernada politik, moral dan filsafat. Pandangannya tentang moral dari sudut telaah Pancasila akan ditampilkan dalam tulisan ini.

Pandangan Durkheim Tentang Masyarakat dan Kenyataan sosial

Durkheim melihat masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antara manusia, sesuatu yang berada di atas segala-galanya. Ia bersifat menentukan dalam perkembangannya. Hal-hal yang paling dalam pada jiwa manusia pun berada di luar diri manusia sebagai individu, misalnya kepercayaan keagamaan, kategori alam pikir, kehendak, bahkan hasrat untuk bunuh diri. Hal-hal tersebut bersifat sosial dan terletak dalam masyarakat.

Masyarakat adalah satu realitas bersifat sui generis, memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dapat ada (ditemukan) kesamaannya di seluruh mayapada ini. Untuk mengerti "masyarakat" yang dimaksud oleh Durkheim dan peranannya yang dimainkan dalam menganalisis tindakan-tindakan kemanusiaan, orang harus melepaskan dari pengertian abstrak dan orang harus lebih melihatnya dari penggunaan perspektif masyarakat itu.

Kenyataan sosial adalah sesuatu yang mencakup seluruh rangkaian kenyataan. "Suatu kenyataan sosial adalah setiap cara bertindak yang ditentukan maupun tidak, yang memiliki kemampuan

menguasai individu dengan tekanan eksternal, atau setiap cara bertindak yang umum di seluruh masyarakat tertentu, namun pada saat yang sama berada mandiri bukan dari manifestasi individualnya".

"Social facts is every way of acting fixed or not, capable of exercising on the individual an external constraint"; or again, every way of acting which is general throughout a given society, while at the same time existing in its own right independent of its individual manifestations". (Durkheim, 1964)

Kenyataan sosial atau fakta yang dimaksud Durkheim di atas, terjadi hanya dalam satu kehidupan bersama yang lebih bersifat komunitas bukan *societas* saja (Nisbet, 1966). Komunitas yang dimaksud di sini merupakan sesuatu yang berada jauh di luar artian lokal. Dalam artian abad ke 19 dan 20, ia meliputi segala bentuk hubungan yang ditandai oleh tingkat keakraban yang sangat tinggi, kedalaman emosi, komitmen moral, kohesi sosial, dan kesinambungan waktu. Komunitas dibangun atas dasar manusia dalam keutuhannya bukan peranan-peranannya yang terpisah-pisah yang ia mainkan dalam tatanan kehidupan bersama.

Komunitas di tangan Durkheim merupakan kerangka analisis yang hal-hal seperti moralitas, hubungan, kontrak, religi, dan bahkan sifat alamiah pikiran manusia mendapatkan pengertian dan dimensi baru. Ide komunitas telah berubah kedudukan, dari sekedar satu kolektivitas dan satu sifat bentuk hubungan antara manusia, ia menjadi alat untuk menganalisis pikir dan tingkah laku.

Masyarakat merupakan sumber dan dasar segala-galanya yang di dalamnya individu sama sekali tidak mempunyai arti dan kedudukan, hal-hal seperti: kejahatan,

sakit jiwa, kesusilaan, kompetisi, ekonomi, undang-undang dan sebagainya, semuanya diterangkan berdasarkan prioritas masyarakat.

Moral dalam filsafat Durkheim

Dalam filsafat Durkheim, moral memiliki peranan terpenting. Kekangan atau wewenang yang dilaksanakan oleh kesadaran kolektif jelas terlihat dalam bidang moral. Sesungguhnya fakta-fakta moral itu ada, tetapi ia hanya hidup dalam konteks sosial. "Biarkanlah kehidupan sosial itu hilang dan musnah jualah kehidupan itu bersama dia" (Lukes, 1973).

Dalam bukunya *Moral Education* Durkheim menandakan :

"But if there is one fact that history has irrefutably demonstrated it is that the morality of each people is directly related to the social structure of the people, given the general character of the morality observed in a given society, and barring abnormal and pathological cases, one can infer the nature of that society, the elements of its structure and the way it is organized. Tell me the marriage patterns, the morale dominating family life, and I will tell you the principle characteristics of its organization". (Durkheim, 1973)

Moralitas dalam segala bentuknya tidak dapat hidup kembali kecuali dalam masyarakat. Ia takkan berubah kecuali dalam hubungannya dengan kondisi-kondisi sosial. Dengan kata lain, moralitas tidak bersumber pada individu, melainkan bersumber pada masyarakat dan merupakan gejala masyarakat. Moral masyarakat berkuasa pada individu. Dalam artian kewajiban misalnya, yang berbicara adalah suara masyarakat dalam arti masyarakatlah yang menentukan dan menekankan segala peraturan-peraturan kehidupan itu berlaku.

Selanjutnya menurut Durkheim, moralitas memiliki tiga unsur yang menentukan. (Durkheim, 1973):

Pertama, adalah *disiplin*. Semua sikap dan tindakan sosial adalah penyesuaian dengan aturan-aturan yang ada. Bersikap dan bertindak susila adalah sama dengan mengikuti dan tunduk patuh pada aturan-aturan. Bidang (domain) kesusilaan ini adalah bidang kewajiban yang sudah tertentu secara tradisional. Apakah sumber unsur yang bersifat prescriptive ini?

Ia adalah masyarakat. Melalui tatakrma keluarga, agama dan ekonomi, ikatan tradisi dan kelompok, masyarakat adalah satu-satunya badan yang memiliki wewenang mutlak yang berhak memberi kepada sesuatu yang patut, yang seharusnya (*ought*), diperbuat oleh manusia. Manusia yang tidak berdisiplin adalah tidak lengkap kesusilaannya. Di sini Durkheim menekankan pada sifat tetap dari moral. Ada beberapa cara untuk bertindak yang seolah-olah secara teratur menentukan sesuatu dalam menghadapi keadaan tertentu. Adalah suatu keharusan bahwa setiap kehidupan bersama terikat pada keteraturan ini. Namun, menurut Durkheim sifat moral yang tetap ini tidaklah bersifat beku, ataupun tidak dapat berubah. Disiplin berubah sesuai dengan sifat alamiah manusia, yang berubah menurut waktu dalam arti lebih aktif, lebih kaya. Cakrawala intelektual dan moral manusia selalu meluas. Kehidupan bersama selalu berkembang, karena itu moral haruslah cukup fleksibel untuk ikut maju. Ia tidak boleh berada di luar atau di atas jangkauan kritik, ia harus tanggap terhadap kritik dan refleksi, yang menurut Durkheim merupakan sarana bagi suatu perubahan. Dalam hal ini aturan-aturan

lama yang tidak sesuai telah diganti dan orang harus lebih waspada akan timbulnya degenerasi dan anarki.

Unsur kedua, mengenai isi moral itu sendiri, yaitu sifat *keterikatan pada kelompok*. Disiplin saja tidak cukup. Agar supaya disiplin dapat mempunyai arti ia harus mempunyai tujuan akhir. Ada beberapa tujuan tertentu yang memberi persifatan moral kepada tindakan-tindakan manusia. Tindakan-tindakan yang selalu tertuju pada keuntungan pribadi, tidaklah memiliki nilai-nilai moral. Hanya tindakan yang tidak memiliki tujuan pribadi serta berada di atas tujuan individual, itulah yang bersifat moral.

Tindakan moral hanyalah tindakan yang ditujukan kepada kepentingan kehidupan bersama. Moral baru mulai kalau ia sudah berada dalam suatu kelompok manusia, bagaimanapun bentuk kelompok itu. Karena manusia baru dapat dikatakan lengkap jika ia sudah menjadi anggota kelompok, maka kesusilaan baru lengkap kalau si manusia itu sudah merasa dipersamakan dalam kelompok tempat ia terlibat. Dengan kata lain kita baru merupakan makhluk moral sejauh kita merupakan makhluk sosial. Dan hanya ada satu makhluk moral yaitu ia yang memiliki kepribadian kolektif. Durkheim menunjukkan bahwa masyarakat terdiri atas beberapa kelompok: keluarga, perkumpulan-perkumpulan, partai, tanah air dan kemanusiaan. Karena dalam keseluruhan kehidupan kolektif kelompok ini tidak sama pentingnya, maka nilai moral mereka pun berbeda. Tujuan utama tingkah laku moral adalah kehidupan politik atau tanah air, tetapi dalam artian murni kemanusiaan. Jadi bukan diartikan sebagai kekuasaan, penjajahan atau perluasan koloni-koloni, melainkan suatu

masyarakat yang perdamaian dan keadilannya berkuasa dan penderitaan individu dapat diperkecil dan ditanggulangi. Durkheim menghadapkan "amal" yang dibangkitkan oleh gereja dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan solidaritas terhadap sesama, atau amal antar individu pada dirinya sendiri hanyalah memiliki nilai moral yang tidak langsung, karena individu-individu itu hanyalah anggota dari suatu kelompok. Seorang individu tidak akan mampu mengadakan perubahan sosial. Ini baru dapat terjadi kalau individu-individu itu bersatu membentuk satu kekuatan kolektif.

Unsur ketiga, yaitu *otonomi kehendak manusia*, mencakup pengertian moral dan sangat penting artinya sebagai hasil proses sekularisasi dan kemajuan rasionalisme. Ia menuntut penghargaan bagi pribadi manusia, yang meskipun merupakan produk kehidupan sekelilingnya, namun tidak menjadi budaknya. Kesadaran moral selalu menolak ketergantungan ini, dan menuntut akan kebebasan yang lebih mantap bagi otonomi individu. Semakin besar pengertian manusia tentang moral, tentang sebab-sebab dan fungsinya, semakin bebaslah ia, dan secara sukarela ia akan tunduk pada peraturan-peraturan moral itu. Untuk bertindak laku susila adalah tidak cukup hanya dengan menghormati disiplin dan terikat kelompok saja. Manusia harus juga memupuk kecerdasannya tentang dasar-dasar dan sebab-sebab tingkah lakunya. Moralitas tidak hanya terdiri atas menjalani perbuatan-perbuatan secara sadar, tetapi harus juga berbuat secara sukarela dan jelas. Di sini rasio semakin menjadi unsur penting dari moralitas, mendidik moral bukanlah berbicara dan

juga bukan mengindoktrinasi melainkan menjelaskan.

Ketiga unsur di atas saling kait-mengkait, dan ini menunjukkan bahwa titik berat terletak pada masyarakat dan daya pikir manusia. Seorang dianggap tidak susila kalau tindakannya itu merugikan kehidupan bersama.

Kesusilaan pada Durkheim bersifat duniawi kemasyarakatan tidak bersangkut-paut dengan sesuatu yang adi kodrati.

Selanjutnya Durkheim mengatakan: "Manusia yang percaya, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ia berterima kasih dan percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakannya, khususnya mengenai jiwanya. Kita juga mempunyai sebab-sebab yang sama untuk berterima kasih dan taqwa kepada kolektivitas". (Durkheim, 1977)

Kemudian lanjutnya: "Saya tidak tahu apa itu yang disebut kesempurnaan yang ideal dan absolut, dan saya tidak minta Anda menganggap bahwa masyarakat itu sempurna. Kita tidak perlu menganggap dia lain dari apa adanya untuk mencintai dan menghormatinya. Kalau kita harus mencintai dan menghormati yang ideal sempurna saja, maka Tuhan pun tidak dapat menjadi obyek penghormatan, karena dunia ciptaannya ini tidak penuh dengan ketidak sempurnaan dan keburukan-keburukan" (Durkheim, 1977).

Pancasila

Sila I. Ketuhanan Yang Maha Esa

Rumusan sila ini mengandung konsep monotheisme, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Satu. Seluruh bangsa mendasarkan moralnya pada kepercayaan

ini, yaitu bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Manusia Indonesia terlahir religius. Dalam jiwanya hadir suatu kerinduan dalam sesuatu yang sempurna, yang memberinya hidup dan melindunginya. Pada masa sebelum Islam dan Kristen masuk ke Indonesia telah berdiri perguruan keagamaan Hindu dan Buddha. Merupakan kenyataan bahwa kepercayaan kepada Yang Esa telah tertanam dalam jiwa rakyat waktu itu. Kedua agama, Islam dan Kristen diterima oleh rakyat dengan damai. Islam mendirikan pesantren-pesantren dan Kristen mendirikan sekolah-sekolah agama dan biara-biara. Apakah artinya ini?

Semua perguruan keagamaan itu mendidik dan menanamkan nilai-nilai moral ke dalam jiwa rakyat, berdasarkan keyakinan bahwa Tuhan Yang Esa itu ada. Moral manusia Indonesia adalah moral yang tidak sekedar sosial melainkan berdasarkan ketaqwaan, tidak mianen melainkan transenden.

Sila II. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila ini menempatkan manusia di tempat yang sentral. Kata adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia diciptakan sama. Sila ini memberikan pengakuan terhadap keseluruhan manusia di dunia, tidak terbatas pada manusia Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan yaitu persamaan, keadilan, toleransi saling mengasihi, dan solidaritas terjaga. Dalam hidupnya manusia ditugaskan untuk berbuat adil, membangun, membina dan mengolah serta mengembangkan alam. Sebagai makhluk sosial, sejak kanak-kanak manusia sudah dididik untuk memikirkan orang lain. Kata adil memiliki arti sangat dalam dan kaya. Keadilan tidaklah diukur dengan hak dan

kewajiban saja. Keadilan yang menjiwai semangat kemanusiaan didasarkan pada upaya untuk saling membantu agar dapat saling berkembang. Perkembangan kemanusiaan ini menuju suatu taraf kemanusiaan yang beradab. Seperti kata Max Scheler, manusia memiliki kemampuan untuk merefleksi dan memutuskan pilihan, karena dunia manusia adalah dunia yang terbuka sifatnya. Menginjak masa dewasa, manusia dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam rangka tugas-tugasnya dalam masyarakat. Manusia dituntut melestarikan tradisi yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama.

Dalam konteks Sila I, Sila II merupakan penjabaran budi manusia, makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang berdasarkan kedudukan kodratnya tergantung pada Sang Pencipta.

Sila III. Persatuan Indonesia

Mensyukuri karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia yang berujud beribu pulau, berpenduduk yang terdiri atas berbagai suku dan berkemampuan berbahasa yang beragam, semangat Bhineka Tunggal Ika benar-benar bermakna sangat dalam. Dalam kebhinekaan itu rakyat Indonesia sadar akan tujuannya untuk bersatu.

Sesuai dengan pandangan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan utuh maka Sila III haruslah dimengerti dalam kaitannya dengan sila-sila yang lain. Dalam hubungan dengan moral Sila I mendasari kejiwaan rakyat Indonesia dalam berupaya, berusaha menjalani hidup. Kehidupan bersama tidak saja didasari oleh solidaritas, melainkan oleh keyakinan taqwa kepada Tuhan Yang Esa.

Sila IV. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Sila ini mengandung cita-cita kefilosofan yaitu kerakyatan, demokrasi dan musyawarah. Siapa yang mampu bermusyawarah ialah manusia-manusia yang berkemampuan menghormati dan mengakui keberadaan sesama manusia. Makhluk yang mampu mengobyektifikasi, yaitu menyadari diri dan menyadari adanya obyek, dan menyadari diri sebagai anggota satu bangsa.

Sila kerakyatan, sebagai bawaan dari persatuan dan kesatuan semua sila, mewujudkan penjelmaan dari tiga sila yang mendahuluinya dan merupakan dasar dari sila kelima. Oleh karena dalam tiga sila yang mendahuluinya terkandung asas-asas hidup kerohanian, sila kerakyatan itu demikian pula keadaannya. Makna yang terkandung dalam hal ini berkaitan dengan Sila I. Kerakyatan mendasarkan dirinya pada kepercayaan adanya Tuhan Yang Satu.

Sila V. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan yang termaktub dalam sila ini, sesuai dengan sifat manusia yang adil seperti yang terkandung dalam Sila II. Kita ingat tulisan Soedjatmoko (1984) tentang agama, yang dimaksud di sini agama wahyu, dalam kaitan suatu bangsa yang sedang membangun:

"..... di dalam suatu masyarakat yang sedang membangun, agama ternyata merupakan suatu unsur yang tidak dapat diabaikan, yang tidak cukup dihadapi secara taktis dan manipulatif, agama perlu dinilai dan diperlukan sebagai suatu sumber otonom yang penting di dalam dinamik bangsa dan masyarakat. Tidak cukup dia dilihat sebagai fenomena sosial

historis semata-mata, tidak cukup potensi dinamik sosialnya dinilai dari luar saja, perlu juga untuk itu dia dilihat, dan diselami dari dalam, dari lubuk hati iman".

Bagaimana manusia dalam hidupnya dituntut rasa kebersamaannya dengan anggota masyarakat yang lain, dan dalam kehidupannya itu manusia selalu berada di bawah lindungan Tuhan. Hal ini menunjukkan kebenaran bahwa setiap sila dalam Pancasila, tak mungkin dapat dipisah satu dari yang lain. Sila I tetap merupakan sila yang mengikatnya. Dari sini tampak bagaimana moral keadilan sosial adalah moral yang berketuhanan, bukan sekedar moral sosial.

Kesimpulan

Dari pembicaraan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Ajaran moral yang diajukan Durkheim menunjukkan bahwa Durkheim yakin moral yang luhur adalah dasar mutlak bagi kehidupan antar manusia yang sejahtera. Durkheim juga merupakan pendukung pendidikan ilmiah yang tangguh.

Dalam pada itu, bangsa Indonesia telah memutuskan untuk melaksanakan pembangunan menyeluruh yang meliputi moral, spiritual dan fisik manusia seutuhnya. Dalam Pancasila segi-segi ini dicerminkan dengan sangat jelas. Yang penting adalah dasar-dasar yang diberikan oleh Sila I. Kedudukan kodrat manusia yaitu manusia berdiri sendiri dan pada saat yang sama merupakan makhluk Tuhan diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia.

Durkheim mengandalkan moralnya pada masyarakat dan semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal inilah yang harus kita waspadai. Karena pemikiran sedemikian

ini membuka kemungkinan penciptaan suatu suasana kehidupan yang tidak seimbang. Jikalau bagi pembangunan hanya dibuat rencana-rencana ilmiah teknis dan organisatoris saja, akan ada kemungkinan bahwa negara dan rakyat akan tergelincir ke dalam keadaan yang beku, ketat, tertutup, tanpa ada keterbukaan lagi bagi hal-hal yang lebih sesuai dengan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Drijarkara, Prof. Dr. S.J., 1971, *Pantjasila dan Religi; Mencari Kepribadian Nasional*, Surabaya.
- Durkheim, E., 1973, *Moral Education*, Translated by Everett K. Wilson and Herman Schnurer from: *L'Education Morale*, 1925. Collier Macmillan Publishers, London.
- " , 1977, *Over Moraliteit*. Terjemahan K.L. van der Leeuw; dari judul: *Determination du fait Moral*, 1906. Boom Meppel, Amsterdam.
- " , 1974, *Sociology and Philosophy*, Translated D.F. Pocock. A Division of Macmillan Publishing Inc., New York.
- " , 1964, *The Division of Labor in Society*, The Free Press, New York. Translated by G. Simpson; from: *De la division du travail social*. Alcan, Paris.
- Franz Magnis-Suseno, 1988, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta.
- Ellul, J., 1984, *The Technological Society*, Translated from the French by John Wilkinson, with an introduction by Robert K. Merton. Vintage Books.
- Koento Wibisono, 1982, *Arti Perkembangan menurut Pandangan Filsafat Positivisme August Comte*, Disertasi. University Press, Yogyakarta.
- Lukes, Steven, 1973, *Emile Durkheim, His Life and Work: A historical Study*, Penguin Books.
- Nisbet, Robert A., 1966, *The Sociological Tradition*, Heinemann, London.
- Notonagoro, 1986, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta.
- Soedjatmoko, 1983, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta.
- Soedjatmoko, 1984, *Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang Agama, Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*, LP3ES, Jakarta.